

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# PSI Dorong DPRD Panggil PAM Jaya

## ▶ Buntut Swastanisasi Air Bersih

Gambir, Warta Kota

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendorong koleganya di dewan untuk memanggil Perumda PAM Jaya.

Pemanggilannya untuk menjelaskan upaya swastanisasi dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dikontrakan kepada PT Moya Indonesia.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggota Wicitra Sastroamidjojo menegaskan, upaya pemanggilan Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya diperlukan sebagai bentuk pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Apalagi, kata Anggota, sebelumnya terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013 yang melarang adanya swastanisasi pengelolaan air minum.

"Saya mendorong ada pembahasan dengan DPRD untuk kami menjalankan fungsi pengawasan karena air bersih adalah hak mendasar, yang pengelolaannya harus benar," kata Anggota berdasarkan keterangannya pada Selasa (25/10/2022).

"Kami perlu tahu bagaimana gambaran kerja sama ini jangan sampai kerjasama ini merugikan Pemprov DKI apalagi merugikan masyarakat," lanjut pria yang akrab disapa Ara ini.

### Potensi Kerugian

Ara mengingatkan, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan rekomendasi untuk pembatalan upaya perpanjangan kontrak eksisting antara PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta, yang habis pada Januari 2023 mendatang.

Selain didasari adanya potensi kerugian yang akan dialami oleh pemerintah daerah, rekomendasi pembatalan itu juga mengacu pada putusan MK yang melarang swastanisasi air minum.

"Saya rasa karena sebelumnya KPK pernah merekomendasikan Pemprov untuk tidak melakukan swastanisasi dengan Aetra, pemerintah perlu berhati-hati dalam

*Saya mendorong ada pembahasan dengan DPRD untuk kami menjalankan fungsi pengawasan karena air bersih adalah hak mendasar, yang pengelolaannya harus benar.*

pengambilan keputusan selanjutnya. Harus ada konsultasi dan uji kelayakan apakah ini bermanfaat bagi Jakarta dan bebas dari masalah hukum," ungkap Ara yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta KPK untuk meninjau kembali swastanisasi air minum yang dilakukan oleh PAM Jaya kepada PT Moya Indonesia.

Uchok mensinyalir, dari perjanjian kerjasama tersebut karena terdapat potensi kerugian bagi pemerintah daerah mencapai Rp 44,7 triliun.

Untuk diketahui, Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia telah meneken nota perjanjian kerja sama (PKS) pada Jumat (14/10/2022) lalu atau dua hari sebelum Anies Baswedan pensiun sebagai Gubernur SKI.

Melalui Surat PAM Jaya Nomor 1954/-072.1 tertanggal 10 Oktober 2022, menetapkan PT Moya Indonesia menjadi pemenang tender.

Adapun PT Moya Indonesia sendiri merupakan Pemrakarsa Proyek dan diketahui masih satu group usaha dengan kontraktor saat ini yakni PT Aetra Air Jakarta. PKS ini meliputi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan aset baru dengan skema pembiayaan bundling. (faf)